

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adi Fahrudin. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung. Rafika Aditama. Hlm. 82.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo. Hlm. 136.
- Alan Wall, Andrew Ellis, et. All. 2016. *Desain Penyelenggaraan Pemilu*. Buku Pedoman Internasional IDEA. terjemahan oleh Djohan Radi. Swedia Internasional IDEA. Hlm. 3, Hlm. 7, Hlm. 8, Hlm. 21 dan Hlm. 22.
- Andi Bulaeng. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*. Yogyakarta : Andi. Hlm. 161.
- Azhari. 2011. *Mereformasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 45, Hlm. 72, Hlm. 76 dan Hlm. 94.
- Jacobus Ranjabar. 2016. *Pengantar Ilmu Politik Dari Ilmu Politik sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung. Alfabeta. Hlm. 266.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hlm. 235.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Ilmu Hukum Tata Negara II*. Cetaka Pertama. Konstitusi Press: Jakarta. Hlm. 185.
- Lexy J. Moleong. 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya: Bandung. Hlm. 14 dan Hlm. 280.
- Malayu S. P Hasibuan. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Hlm. 103.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. *Analisa Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992. Hlm. 105.
- Miftah Thoha. 2008. *Birokrasi Pemerintah di Era Reformasi*. Jakarta. Kencana. Hlm. 77.
- Moh Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 63.
- Mustafa Lutfi. 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta. Hlm. 144.
- Nurul Ulfatin. 2017. *Metode Penelitian*. Malang: Media Nusa Creative. Hlm. 25.
- Nurul Zuriah. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm. 92.
- Ramlan Surbakti, Kris Nugroho. 2015. *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Kemitraan Partnership bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Jakarta. Hlm. 17, Hlm. 18, Hlm.21 dan Hlm. 57.
- Said, M. Mas'ud. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang. Hlm.2.
- Sugiyono. 2017. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 372.
- Sugiyono. 2017. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 336 Hlm. 337 dan Hlm. 345.

- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 129.
- Syafuan Rozi. 2006. *Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak: Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: P2P-LIPI. Hlm. 17.

B. JURNAL

- Asep Warlan Yusuf ahli Hukum Tata Negara. *Hukum dan Keadilan*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325].
- Dooley, L. M. (2005). *Case Study Research and Theory Building*. *Advances in Developing Human Resources* Vol.4 N.3, 4(3), 335–354.
- Dwi Satrio Sepriyanto, Wijaya Kusuma, Azrita Mardhalena. *Pelaksanaan Pengangkatan Pejabat Struktural Kelurahan di Lingkungan Kota Singkawang*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013. Program Studi Administrasi Negara. Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak. Volume 1 Nomor 0001 (2013).
- Gazibo, Mamoudou. 'The Forging of Institutional Autonomy: A Comparative Study of Electoral Management Commissions in Africa' (*Penempaan Otonomi Kelembagaan: Sebuah Studi Perbandingan Komisi Pemilihan Umum di Afrika*). *Canadian Journal of Political Science*. 39/3 (September 2006).
- Hartlyn, Jonathan, McCoy, Jennifer dan Mustillo, Thomas M. 'Electoral Governance Matters: Explaining the Quality of Elections in Contemporary Latin America' (*Permasalahan Pengaturan Kepemiluan: Menjelaskan Kualitas Pemilu di Amerika Latin Kontemporer*). *Comparative Political Studies*. 41/1 (2008).
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hlm. 235.
- Rizki Muharlin Rayadi dan Drs. Erman M, M.Si. *Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011)*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 1 Nomor 1 (2014): WISUDA FEBRUARI 2014 page. 1-14.
- Rosi Nur Hidayati. *Mutasi Aparatur Pemerintah dan Kepentingan Politik : Studi Kasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-Qosim*. *Jurnal Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Jurnal Politik Muda*. Volume 2 - Nomor 1 / 2013-01, Januari-Maret 2012. Hlm. 186-193187.
- Suparman Marzuki. *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis*. artikel dalam *Jurnal Hukum*. Nomor 3 Volume 15 Juli 2008. Hlm. 399.

C. MODUL

Bambang Purwoko, Isep Parid Yahya, Mahesti Hasanah. *Modul Pembelajaran Organisasi dan Birokrasi Pemilu*. Fisipol Universitas Gadjah Mada. Hlm. 19, Hlm. 26 dan Hlm. 30.

D. INTERNET

Artikel *online*. politik. kompasiana. com. <http://politik.kompasiana.com/2012/04/24/birokrasi-vs-politik-457730.html> diakses tanggal 25 Januari 2019, pukul 13:52).

Helden, dalam artikel *online* (politik.kompasiana.com). (<http://politik.kompasiana.com/2012/04/24/birokrasi-vs-politik-457730.html> diakses tanggal 25 Oktober 2014, pukul 15:36).

James Scott, C. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta : LP3S. Cetakan Kedua Dalam Tulisan Nurul Ashiqin Binti Mohd Nasron. Universitas Malaysia Sabah. Fakultas Kemanusiaan, Seni dan Warisan. 2016. *Defenisi Hubungan Patron-Klien*. <https://www.academia.edu/36528160/>.

Simon Chesterman, hlm.42, dalam www.uop.com, diakses tanggal 5 Juni 2019.

Sofian Effendi (Noval Dhwinuari Anthony/detikcom), *Intervensi Politik dalam Manajemen Jabatan PNS Masih Tinggi*, <https://news.detik.com/berita/d-3916775/intervensi-politik-dalam-manajemen-jabatan-pns-masih-tinggi>, Rabu 14 Maret 2019, 18:31 WIB.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindehan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 tahun 2012 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.



